

## Edukasi Anti Kekerasan Pada Peserta Didik Sebagai Upaya Preventif di Lingkungan Sekolah

Bayu Anggoro Putro\*

Program Studi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author. e-mail: bayuanggoro.2020@student.uny.ac.id.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program edukasi anti kekerasan terhadap peserta didik sebagai strategi preventif untuk meningkatkan pemahaman bentuk-bentuk kekerasan, kesadaran pelaporan, menghindari sebagai pelaku, dan penguatan karakter di lingkungan sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi wawancara terhadap peserta didik, guru, kepala sekolah, maupun observasi pelaksanaan program edukasi. Informan dan sekolah sasaran program ditentukan berdasarkan kriteria kebutuhan (purposif). Hasil evaluasi CIPP (context, input, process, dan product), mampu menunjukkan program sebagai penguatan iklim positif sekolah, memperkuat legitimasi nilai karakter dan kurikulum, maupun fondasi awal pembentukan budaya sekolah yang berkeadaban. Hasil Utilization Focused Evaluation (UFE), mengindikasikan bahwa program edukasi memberikan inklusivitas dan kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa program edukasi anti kekerasan yang dirancang dengan berbasis kebutuhan dan bukti menunjang pencapaian sustainable development goals, khususnya pada poin keempat mengenai. mengenai pendidikan berkualitas dan poin kelima kesetaraan gender.

**Kata kunci:** edukasi anti kekerasan, sekolah inklusif, penguatan karakter

### Abstract

*This study aims to analyze an anti-violence education program for students as a preventive strategy to increase understanding of forms of violence, awareness of reporting, avoidance of being a perpetrator, as well strengthening character in the school environment. Data collection techniques were carried out through triangulation of interviews with students, teachers, principals, and observations of the implementation of the education program. Informants and target schools for the program were determined based on needs criteria (purposive). The results of the CIPP evaluation (context, input, process, and product) showed the program as strengthening a positive school climate, strengthening the legitimacy of character values and curriculum, as well as the initial foundation for the formation of a civilized school culture. The results of the Utilization Focused Evaluation (UFE) indicated that the education program provides inclusivity and gender equality in the school environment. The conclusion of this study confirms that an anti-violence education program designed based on needs and evidence supports the achievement of sustainable development goals, especially in point four regarding quality education and points five gender quality.*

**Keywords:** violence prevention education, inclusive schools, character building in schools



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak menjadi salah satu fenomena yang menuai perhatian serius, tak terkecuali dalam lingkungan sekolah. Kekerasan tidak hanya mencakup tindakan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal seperti bentuk penghinaan, pengucilan, seksual serta kekerasan secara siber yang semakin meningkat seiring perkembangan media digital. Beragam penelitian mampu menunjukkan bahwa kekerasan pada anak memberikan dampak yang krusial terhadap kesehatan mental yakni depresi, kecemasan, serta menurunnya motivasi belajar yang melemahkan prestasi akademik. Salah satu penelitian dari (Nurfatihah et al., 2024, pp. 93-101), bahwa pengalaman kekerasan yang dialami peserta didik memiliki keterkaitan yang signifikan dengan rendahnya kepercayaan pada diri. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (dalam berita Antara), adanya laporan sejak 2021 hingga 2023 tercatat 127 kekerasan di sekolah yang tertangani Kemendikbudristek.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia (JPPI) dalam (berita Kompas) sementara itu, memaparkan adanya lonjakan kasus kekerasan dalam sekolah dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, berkisar 31% dari laporan tersebut terkait dengan fisik. Hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) 2024 (berita Detik Edu) yang menyatakan hal serupa bahwa terjadi peningkatan pada kasus kekerasan berjumlah 101 korban kekerasan seksual di satuan pendidikan terjadi sepanjang tahun, 62.5% pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama (SMA). Selain itu, survei oleh lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2023, tercatat bahwa dari total 2.164 pengaduan kasus anak lebih dari 41% berkaitan dengan kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk fisik, verbal, sosial, kasus seksual, bahkan siber. Kemudian, dipertajam adanya laporan evaluasi gender dan anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari DP3AP2KB (2023), 44,3% anak menjadi korban kekerasan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung menormalisasikan kerentanan sebagai hambatan, bukan potensi. Padahal, pendidikan semestinya menjadi arena untuk menguatkan nilai empati, nilai solidaritas, maupun kesetaraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau (Sisdiknas) khususnya dalam hal mewujudkan pendidikan berkarakter, berkeadilan, maupun menjunjung tinggi martabat tiap individu. Pasalnya, kekerasan jelas bertentangan langsung dengan pembentukan nilai demokratis, akhlak mulia, maupun tanggung jawab sosial.

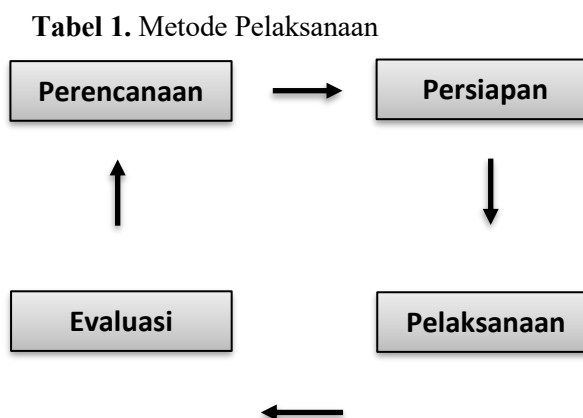
Berdasarkan urgensi tersebut dapat diperkuat latar belakang penelitian, sebagai generasi muda berintelektual yang memiliki peran sosial dalam pendidikan. Pelaksanaan edukasi anti kekerasan menjadi bentuk kontribusi yang terlibat langsung dalam merealisasikan desain kebijakan untuk sekolah dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, maupun sikap yang positif bersama terhadap fenomena kekerasan peserta didik. Program anti kekerasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga transformatif dan edukatif, karena dirancang untuk membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, maupun menempatkan peserta didik sebagai subyek utama pembelajaran. Penelitian dari (Afandi et al., 2025, pp. 8-12), juga dapat memperkuat bahwa sosialisasi materi anti kekerasan menumbuhkan kepedulian pada peserta didik untuk memiliki keberanian melapor jika mengalami ataupun menyaksikan, menghindari sebagai perilaku, dan mengetahui dampaknya. Sekolah diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan yang tegas menolak kekerasan, menghargai keberagaman, kerentanan, hingga menunjang terbentuknya karakter warga sekolah yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Duta Potensi Pemuda Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang membawa karakter kebangsaan

maupun kepedulian terhadap isu-isu sosial. Kehadiran peran Duta Potensi Pemuda Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan juga substantif melalui partisipasi aktif dan masif dalam kegiatan advokatif, edukatif, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program edukasi, diskusi, dan refleksi kritis bersama peserta didik. Duta Potensi Pemuda Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menginternalisasikan pola pikir peserta didik dari budaya yang permisif terhadap kekerasan menuju kebiasaan saling menghormati dan terbuka dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Praktik edukasi anti kekerasan oleh Duta Potensi Pemuda Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pengabdian masyarakat karena peneliti merupakan bagian mahasiswa yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan. Praktik edukasi pada sekolah juga menjadi upaya hilirisasi pengetahuan akademik terhadap konteks sosial, dapat dikatakan menjembatani normatif kebijakan pendidikan dengan praktik nyata di lapangan. Lebih lanjut kegiatan edukasi anti kekerasan tentunya juga berkaitan dengan fungsi dharmia pengajaran serta pendidikan, karena mampu mengintegrasikan pembelajaran yang bermakna dalam sosial-emosional. Situasi yang sama, edukasi anti kekerasan mampu ini menjadi dasar bagi fungsi dharmia penelitian melalui dokumentasi praktik baik, refleksi empiris, maupun analisis dampak program terhadap perubahan pemahaman bahkan sikap peserta didik (Zakaria et al., 2023, pp. 27-31). Kebaruan atau (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan edukasi (*preventif approach*) yang mengintegrasikan peningkatan kesadaran pelaporan dan penguatan karakter peserta didik, baik cakupan verbal, fisik, seksual, dan siber. Tidak sampai disitu, juga dibekali pengetahuan konsekuensi psikososialnya. Kebaruan lainnya terdapat pada pelibatan sosok pemuda yakni Duta Potensi Pemuda Indonesia sebagai fasilitator edukasi dengan pendekatan *peer role model*. Edukasi yang disampaikan oleh figur sebaya yang memiliki legitimasi sosial berpotensi meminimalisir hierarkis antara pendidik serta peserta didik. Model tersebut masih terbatas untuk diimplementasikan pada program edukasi, apalagi anti kekerasan di sekolah. Edukasi yang dilakukan peneliti bukan sekadar berorientasi terhadap perkembangan pengetahuan (*cognitive outcomes*), tetapi juga pembentukan keberanian bertindak (*affective and behavioral outcomes*) yang tentunya bertujuan agar tidak menormalisasikan kekerasan di sekolah.

## METODE PENELITIAN

Praktik edukasi anti kekerasan terhadap peserta didik ini diterapkan melalui tahapan terstruktur untuk memastikan kegiatan berjalan secara partisipatif, efektif, serta berkelanjutan diantaranya tahap perencanaan, persiapan dan materi edukasi, pelaksanaan edukasi, dan evaluasi disertai refleksi.



### 1. Tahap Perencanaan/Analisis Kebutuhan

Tahap pertama melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi situasi lingkungan belajar, karakteristik peserta didik sebagai subyek edukasi, serta bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi baik kekerasan verbal, seksual, siber, dan fisik). Perencanaan dan analisis kebutuhan bertujuan agar program yang dilaksanakan bersifat responsif maupun kontekstual terhadap kebutuhan sekolah.

### 2. Tahap Persiapan dan Materi Edukasi

Berdasarkan observasi serta analisis kebutuhan, peneliti mulai menyusun materi edukasi yang menegaskan aspek pemahaman bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak sosial hingga psikologis, maupun kewajiban beserta hak peserta didik dalam menciptakan lingkungan di sekolah yang aman. Media yang digunakan peneliti berupa *powerpoint* dan *quiziz*. Disusun secara interaktif serta komunikatif, seperti paparan visual menarik, simulasi sederhana, maupun studi kasus untuk mendukung partisipasi aktif peserta didik selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1. Powerpoint Edukasi

### 3. Tahap Pelaksanaan Edukasi

Praktik edukasi dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi partisipatif, mulanya peserta didik distimulus mengenai pemahaman terkait berbagai bentuk kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan yang kerap dinormalisasikan seperti hinaan verbal, intimidasi fisik dan digital, maupun sentuhan yang tidak pantas. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk merefleksikan sikap maupun tanggung jawab dalam memitigasi kekerasan yaitu tidak menjadi pelaku, memahami langkah aman saat mengalami kekerasan, hingga berani melapor maupun mencari bantuan ketika menyaksikan tindakan kekerasan pada lingkungan sekolah. Keberanian melapor ataupun mencari bantuan difokuskan pada mekanisme pelaporan yang terkendali, pihak-pihak mana yang layak untuk dihubungi, maupun perlindungan terhadap pelapor serta korban. Penguatan dalam tahap pelaksanaan berfungsi untuk mengurangi stigma bahkan rasa takut peserta didik dalam melapor kekerasan, sekaligus menguatkan budaya saling peduli (empati), sekaligus bertanggung jawab mewujudkan budaya inklusif di lingkungan sekolah.

#### 4. Tahap Ealuasi dan Refleksi

Tahap ini sebagai penutup program edukasi untuk meninjau perubahan pemahaman serta sikap peserta didik setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dikonseptkan secara konstruktif yang mana terdapat diskusi reflektif dan umpan balik peserta didik selama kegiatan edukasi berlangsung. Hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program, sebagai bahan refleksi, maupun rekomendasi pengembangan program edukasi anti kekerasan di masa mendatang (Purnomo et al., 2022, pp. 2235-2241).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Budaya Sekolah

Salah satu akar masalah dari lemahnya budaya inklusif di sekolah adalah tidak adanya sistem bersama untuk menginternalisasi nilai empati terhadap perbedaan. Sekolah sering kali bersifat administratif bahkan mengakarnya sistem kepatuhan. Sistem kepatuhan tersebut menempatkan otoritas sebagai nilai utama, tanpa diiringi ruang dialog, refleksi kritis, hingga perlindungan hak pada peserta didik, (Anisa, C.A, 2020, pp. 155-173). Sistem kepatuhan berpotensi timbulnya kekerasan fisik, khususnya ketika tindakan pendisiplinan terjadi dengan hukuman yang melibatkan kontak fisik ataupun tindakan koersif. Kekerasan fisik kerap dinormalisasikan sebagai tindakan pembinaan. Peneliti memiliki sudut pandang berbeda, adanya tindakan tersebut memicu peserta didik tidak memiliki keberanian untuk melapor serta menolak, karena takut dianggap melanggar kewenangan pihak sekolah. Lebih lanjut, sistem kepatuhan juga bersangkutan dengan kekerasan verbal seperti labelisasi negatif, pengucilan, bentakan, dan hinaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa. Tidak hanya itu, sistem kepatuhan apabila tidak diimbangi mekanisme perlindungan, tentunya akan melahirkan suatu kerentanan terhadap kekerasan seksual. Relasi kuasa yang timpang dan disertai budaya takut melapor, menimbulkan ketidakberanian peserta didik untuk melapor, khawatir akan timbulnya stigma, sanksi, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem sekolah sebagai institusi yang berfungsi melindungi korban. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan tersebut program edukasi anti kekerasan yang digambarkan peneliti memiliki nilai guna (utilitas) sebagai usaha untuk mengubah paradigma kepatuhan sekolah yang bersifat represif menuju transformatif berbasis nilai kesadaran maupun penghormatan terhadap martabat peserta didik.

#### Sekolah Sasaran Edukasi

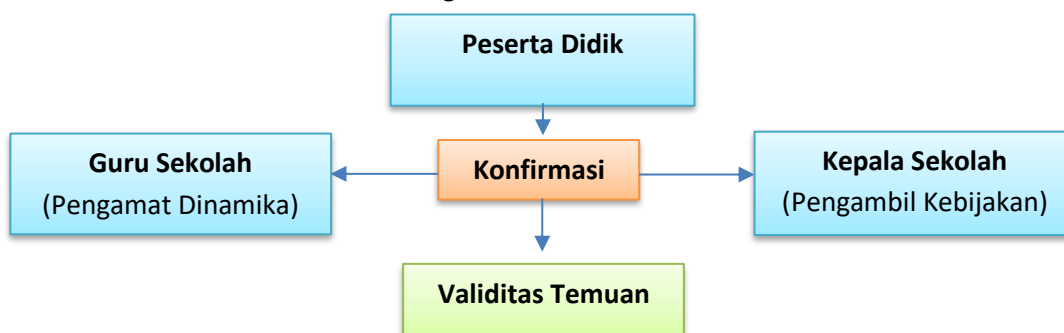
Program edukasi yang dijalankan peneliti ini sebagai bentuk aktivitas pembelajaran sosial yang menekankan dialogis dan kolaboratif antar peneliti sebagai mahasiswa, peserta didik, maupun pemangku kepentingan institusi. Sekolah yang menjadi sasaran program edukasi anti kekerasan yakni jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Pertimbangan peneliti terhadap dua jenjang tersebut didasarkan pada fase perkembangan remaja yang rentan terhadap kekerasan yang disebabkan dinamika pencarian identitas, emosional, serta intensitas relasi sosial. Fase Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), peserta didik berisiko terlibat dalam kekerasan fisik, verbal, siber, dan seksual, (Theresia & Sanjaya, 2024, pp. 219-228). Ditambah belum sepenuhnya memiliki literasi bahkan keberanian melapor. Dengan begitu, intervensi edukasi anti kekerasan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi langkah strategis dalam membangun sikap, kesadaran, karakter peserta didik, maupun kepekaan warga sekolah secara keberlanjutan. Sekolah tersebut diantaranya SMA Bhineka Tunggal Ika Kota Yogyakarta, SMP IT-AI Khairat Kota Yogyakarta, SMA Gama Kota Yogyakarta, serta SMP Negeri 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

- a. SMA di Bhineka Tunggal Ika ditunjuk peneliti sebagai sekolah yang masih membutuhkan penguatan upaya pencegahan kekerasan. Sekolah tersebut memiliki dinamika internal dalam tata kelola yayasan dan mekanisme akan pengawasan peserta didik yang perlu diperkuat, khususnya

pada konteks interaksi antar individu yang berasal dari keberagaman aspek sosial, budaya, dan identitas karena sekolah tersebut berada di zona urbanisasi. Kondisi tersebut selaras dengan temuan (Ramadhani & Purnama 2024, pp. 37-44), menjelaskan bahwa di lingkungan sekolah yang mana memiliki tingkat keberagaman signifikan cenderung berpotensi menghadapi kerentanan terhadap kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun siber.

- b. SMP IT-AI Khairat dipilih sebagai sekolah untuk program edukasi anti kekerasan, karena karakteristik sekolah yang berbasis teknologi serta intensitas penerapan *platform* digital dalam proses pembelajaran, (Tuhuteru et al., 2023, pp. 1893-1900). Pemanfaatan teknologi jika tidak disertai bagaimana pengelolaan dan literasi etika yang memadai, maka ternilai riskan untuk membuka ruang terjadinya bentuk kekerasan, baik kekerasan psikologis, siber, seksual digital, bahkan simbolik di ruang daring. Kemudian, peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada dalam perkembangan regulasi emosi hingga keterampilan sosial yang masih memerlukan bimbingan dan arahan. Oleh karena itu, fase Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki kerentanan terhadap perilaku yang agresif secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa kondisi tersebut menjadikan program edukasi anti kekerasan sebagai tindakan preventif yang dapat memperkokoh kesadaran penggunaan teknologi secara beretika hingga membangun iklim belajar yang sehat, aman, serta juga berkeadaban.
- c. SMA Gama Yogyakarta ditentukan oleh peneliti sebagai program edukasi anti kekerasan, karena memiliki populasi peserta didik yang beragam dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan etnis. Peserta didik tersebut juga memiliki orang tua yang berlatar belakang imigran. Situasi keberagaman ini menuntut penguatan inklusi, penghormatan terhadap perbedaan, dan meminimalisir praktik stigmatisasi yang berpotensi timbul kekerasan di sekolah. Keberagaman latar belakang budaya, etnis, sosial, dan kesiapan pola asuh orang tua mampu menjadi faktor yang berisiko dalam membentuk kekerasan relasional bahkan psikologis pada peserta didik jika tidak dikelola melalui pendidikan nilai serta iklim sekolah yang suportif. Tidak sebatas itu, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah fase dengan tingkat tekanan akademik maupun tuntutan pencapaian yang meningkat yang mampu memicu perilaku agresif.
- d. SMP Negeri 1 Pengasih Yogyakarta ditentukan peneliti sebagai sekolah sasaran dalam melaksanakan program edukasi anti kekerasan, dikarenakan keberadaannya di wilayah rural yang artinya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan konseling serta dukungan psikososial di lingkungan peserta didik. Kendala sumber daya pendukung menjadikan pencegahan, pemahaman anti kekerasan berbasis edukasi, penguatan karakter, maupun peningkatan kesadaran pelaporan sebagai kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, turut andilnya program edukasi anti kekerasan diposisikan sebagai tindakan preventif untuk memperkuat kapasitas peserta didik serta pendidik dalam mengenali, mencegah, dan merespon perilaku kekerasan secara tepat.

**Tabel 2.** Triangulasi Sumber



Keabsahan data penelitian ini melalui telaah triangulasi sumber dengan melibatkan informan peserta didik, guru, maupun kepala sekolah yang dipilih secara *purposive sampling*. Pasalnya, teknik purposif diterapkan untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam selaras dengan fokus aspek penelitian yakni pemahaman, sikap, hingga praktik pencegahan kekerasan dalam konteks program edukasi anti kekerasan di sekolah (Asrulla et al., 2023, pp. 26320-26332). Triangulasi sumber ini memungkinkan peneliti untuk dapat membandingkan maupun mengonfirmasi temuan dari perspektif

yang berbeda. Peserta didik sebagai subyek penerima program edukasi anti kekerasan, guru sebagai pendamping sekaligus pengamat terhadap dinamika perilaku. hingga kepala sekolah sebagai promotor dalam pengambilan kebijakan serta penanggung jawab tata kelola. Dengan demikian, validitas data tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang, melainkan penerapan konstruksi melalui konsistensi temuan lintas peran serta konteks sekolah yang beragam. sehingga dapat meminimalisir terjadinya bias subyektivitas serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Berikut hasil program edukasi anti kekerasan terhadap peserta didik sebagai upaya preventif, kesadaran pelaporan, dan penguatan karakter di keempat sekolah yang memiliki karakteristik berbeda.

**Tabel 3.** Kriteria Informan

Peran	Kriteria
Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan keaktifan mengikuti aktivitas edukasi anti kekerasan.</li> <li>b. Berada di jenjang kelas yang memungkinkan adanya keterlibatan sosial secara intensif.</li> <li>c. Memiliki keterampilan komunikasi yang dapat memadai, tidak lupa juga merepresentasikan akan pemahaman, mengenai pengalaman, serta sikap bentuk-bentuk kekerasan</li> </ul>
Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki peran dalam pembinaan dan intensitas interaksi terhadap peserta didik.</li> <li>b. Sebagai guru memahami maupun memiliki pengalaman menangani maupun mengamati dinamika perilaku peserta didik di lingkungan sekolah.</li> </ul>
Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kewenangan dalam tata kelola kebijakan maupun prinsip pengambilan keputusan.</li> <li>b. Memahami mekanisme pencegahan maupun penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.</li> <li>c. Berorientasi terhadap penguatan budaya sekolah yang inklusif dan aman.</li> </ul>





Gambar 2. Praktik Edukasi

**Hasil Program SMA Bhineka Tunggal Ika, Kota Yogyakarta**

Hari dan Tanggal : 25 Februari 2025  
Waktu : 14.00-15.30 WIB  
Lokasi : SMA Bhineka Tunggal Ika Kota Yogyakarta  
Penyelenggara : Duta Potensi Pemuda Indonesia DIY

Hasil triangulasi pada wawancara yang mengintegrasikan informan peserta didik, guru, dan kepala sekolah di SMA Bhineka Tunggal Ika mengindikasikan adanya perkembangan pada pemahaman kolektif mengenai bentuk-bentuk kekerasan sesudah praktik program edukasi anti kekerasan. Peserta didik (25/02/25) juga mulai mampu mengidentifikasi kekerasan fisik, verbal, seksual, siber, dan psikologis yang mudah terjadi dalam interaksi keseharian baik secara langsung maupun digital. Dipertajam oleh perspektif guru (25/02/25), bahwa praktik program edukasi anti kekerasan dipandang membantu menguraikan batasan antara perilaku bersenda gurau dengan tindakan lain yang mengandung unsur kekerasan, khususnya terhadap fisik, verbal, dan psikologis

yang kerap kali minim untuk disadari. Guru juga memperjelas bahwa peningkatan pemahaman peserta didik bermakna terhadap penurunan normalisasi perilaku agresif yang dinilai wajar dalam dinamika pergaulan remaja. Selain itu, praktik program edukasi anti kekerasan juga bisa merefleksikan peran pendidik sebagai agen pencegahan yang tidak mengutamakan sikap represif, justru mengedepankan edukatif serta reflektif. Sementara itu, temuan kepala sekolah (25/02/25) sependapat dengan peserta didik dan guru bahwa program edukasi anti kekerasan berkontribusi dalam penguatan budaya sekolah yang lebih inklusif dan aman. Hasil wawancara pada kepala sekolah juga menunjukkan program diterima dengan positif dan sebagai instrumen preventif yang mendorong sistem tata kelola di sekolah. Termasuk dalam tindakan pencegahan kekerasan secara awal, peningkatan kesadaran seluruh warga di sekolah, maupun mekanisme perlindungan terhadap peserta didik.

Lebih detail, keberanian untuk melapor menjadi temuan urgensi dalam konteks preventif bahwa peserta didik menyampaikan program edukasi anti kekerasan dapat meminimalisir rasa takut serta stigma dalam proses pelaporan. Guru bahkan kepala sekolah juga memvalidasi adanya peningkatan keterbukaan peserta didik untuk menjelaskan laporan atau keluhan, meskipun mekanisme formal pelaporan masih diperlukan penguatan agar lebih ramah anak hingga mudah diakses. Secara keseluruhan hasil triangulasi kualitatif di SMA Bhineka Tunggal Ika DIY menginsyaratkan praktik program edukasi anti kekerasan berfungsi sebagai jalan yang efektif, karena dilaksanakan secara luring dalam meningkatkan pemahaman, menumbuhkan sikap kewaspadaan, serta membentuk keberanian melapor peserta didik. Penelitian yang dilakukan peneliti menekankan kembali pentingnya pendekatan edukatif yang partisipatif dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan di sekolah.

#### **Hasil Program SMP Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo**

Hari dan Tanggal : 15 Mei 2025  
Waktu : 09.00-10.30 WIB  
Lokasi : SMP Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo  
Penyelenggara : Duta Potensi Pemuda Indonesia DIY

Hasil triangulasi kualitatif pada SMP Negeri 1 Pengasih, Kulon Progo membuktikan bahwa peserta didik (15/05/2025) mulai memahami bentuk kekerasan bisa terjadi kapan pun dan dimana pun. Peserta didik juga mulai bisa mengidentifikasi kekerasan tidak hanya satu jenis saja, tetapi beragam (fisik, verbal, seksual, serta siber). Temuan tersebut ditunjang oleh pendapat guru (15/05/2025) yang mengamati bahwa peserta didik menunjukkan kesadaran baru terhadap kekerasan non-fisik juga maupun dampak psikologis dari kekerasan. Tinjauan kepala sekolah (15/05/2025), program edukasi anti kekerasan berkontribusi untuk membangun kesamaan persepsi maupun tanggung jawab bersama pada lingkungan sekolah mengenai perilaku yang dikategorikan sebagai kekerasan. Mengingat letak SMP Negeri 1 Pengasih berada di daerah rural dengan keterbatasan akses layanan konseling maupun dukungan psikososial, (Juniar et al., 2024, pp. 7-16). Mengacu pada konteks preventif, tentu peneliti menjalin kerjasama dengan *stakeholder* sekolah, karena berperan sebagai ruang utama dalam memberi pemahaman dan pencegahan dini kekerasan terhadap peserta didik di wilayah rural.

Aspek kemampuan menghindari sebagai perilaku, peserta didik juga mengungkapkan bagaimana strategi protektif seperti membatasi interaksi ataupun lingkungan pergaulan yang berisiko tinggi. Peserta didik juga mulai memahami bagaimana sanksi yang didapat baik secara hukum dan sosial. Guru dan kepala sekolah memperkaya temuan bahwa program edukasi hal anti kekerasan relevan dengan keterbatasan sumber daya di sekolah, karena lebih menekankan penguatan kapasitas individu daripada penanganan kuratif. Analisis pada aspek keberanian melapor, hasil triangulasi menggambarkan terdapat perubahan pada sikap peserta didik yang sebelumnya cenderung takut dan diam, setelah mengikuti program edukasi anti kekerasan mulai memahami pentingnya melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak sekolah yang berwenang untuk perlindungan diri maupun tindakan menjaga keamanan bersama. Guru beserta kepala sekolah mengkonfirmasi adanya kemajuan

keterbukaan peserta didik saat menyampaikan permasalahan, meskipun masih diperlukan penguatan sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan. Nantinya, peserta didik merasa lebih terlindungi dan konsisten dalam mengungkapkan permasalahan tanpa rasa takut maupun khawatir berlebihan. Iklim sekolah saat pelaksanaan edukasi mulai lebih suportif serta responsif terhadap kebutuhan psikososial peserta didik.

#### **Hasil Program SMA Gama, Kota Yogyakarta**

Hari dan Tanggal : 5 Agustus 2025  
 Waktu : 13.00-15.00 WIB  
 Lokasi : SMA Gama, Kota Yogyakarta  
 Penyelenggara : Duta Potensi Pemuda Indonesia DIY

Hasil triangulasi data yang diperoleh dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah di SMA Gama Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa program edukasi anti kekerasan menjadi fondasi untuk menciptakan iklim sekolah yang bebas dari tindakan kekerasan. Diawali pernyataan peserta didik (05/08/2025), program edukasi anti kekerasan berkontribusi terhadap penguatan pemahaman terkait batasan perilaku yang sebelumnya tidak sepenuhnya peserta didik peroleh melalui lingkungan keluarga, khususnya bagi peserta didik yang kondisi orang tua sebagai imigran. Perbedaan latar belakang nilai, etnis, dan budaya dalam membahas isu relasi sosial serta kekerasan memicu beberapa peserta didik belum memiliki referensi yang terjangkau untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan. Melalui program edukasi anti kekerasan peserta didik menemukan alur berpikir yang lebih sistematis mengenai dampak terjadi kekerasan, menghindari sebagai pelaku, sekaligus mengelola relasi sosial secara terkendali, kemudian, membatasi proses interaksi digital yang berisiko. Temuan tersebut mengakar kuat bahwa program edukasi anti kekerasan berfungsi sebagai bekal kehidupan peserta didik demi masa depan gemilang dalam mendukung pengambilan keputusan sosialnya, terutama dalam konteks keberagaman serta kerentanan sosial, karena mencegah lebih baik daripada mengatasi.

Situasi yang serupa guru (05/08/2025), memandang program edukasi anti kekerasan menjadi sarana penguatan literasi kekerasan di kalangan peserta didik, terutama dalam konteks sekolah yang multikultural dan menitikberatkan pembekalan karakter di sekolah lebih intensif, karena kesibukan orang tua sebagai imigran. Guru memahami bahwa keberagaman latar belakang peserta didik memerlukan pendekatan yang edukatif, interaktif, maupun partisipatif yang memfokuskan nilai empati serta inklusif dalam mencegah kekerasan. Kacamata kepala sekolah memperjelas temuan dari peserta didik bahkan guru, bahwa program edukasi anti kekerasan menumbuhkan keberanian peserta didik untuk melapor dan lebih waspada pada perilaku kekerasan baik di sekolah maupun dalam lingkungan sekelilingnya. Kepala sekolah (05/08/2025) mengamati sebelum terlaksananya program edukasi anti kekerasan, kecenderungan perasaan diri sebagai kelompok minoritas, stigma, dan takut masih dirasakan oleh peserta didik. Mekanisme pelaporan dipahami peserta didik serta warga sekolah, bukan sebagai bentuk pengaduan yang berisiko dalam menimbulkan konsekuensi negatif. Dapat diketahui, bahwa keseluruhan hasil triangulasi di SMA Gama, Yogyakarta menunjukkan konsistensi persepsi dari ketiga informan bahwa pendekatan preventif berbasis edukasi menjadi faktor eksternal yang mendukung terciptanya iklim sekolah aman, karena komponen pendidikan selain sekolah terdapat masyarakat yang mampu menguatkan pembelajaran sehingga sekolah tidak dapat bekerja secara instan sendiri.

#### **Hasil Program SMP IT Al-Khairat, Kota Yogyakarta**

Hari dan Tanggal : Kamis 18 September 2025  
 Waktu : 08.20 - 09.30 WIB  
 Lokasi : SMP IT Al-Khairat, Kota Yogyakarta  
 Penyelenggara : Duta Potensi Pemuda Indonesia DIY

Menelusik hasil triangulasi data wawancara yang diperoleh melalui peserta didik, mendeskripsikan terdapat kesesuaian terhadap pemahaman mengenai urgensi program edukasi anti kekerasan di lingkungan sekolah berbasis teknologi. Intensitas penggunaan teknologi saat proses pembelajaran dipandang sebagai faktor dari eksternal yang memberikan kesempatan akses dan risiko, khususnya dalam menimbulkan kekerasan verbal, siber, bahkan seksual di lingkup digital, apabila

tidak dibersamai dengan penguatan regulasi perilaku serta nilai etika. Peserta didik (18/09/2025), bahwa interaksi melalui *platform* digital seperti halnya gadget, komputer, maupun *platform* pembelajaran daring kerap menjadi ruang terciptanya dialog yang juga dapat tidak terkendali termasuk penggunaan bahasa yang menyudutkan, eksklusi sosial, hingga pelecehan verbal. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak semata-merta dimaknai dalam bentuk fisik, tetapi muncul dalam bentuk nonfisik yang sering tidak disadari oleh peserta didik. Dipertegas dari persepsi guru (18/09/2025), bahwa di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) perkembangan keterampilan dan regulasi emosi peserta didik berada pada fase transisi, sehingga membutuhkan pendampingan secara konsisten. Apalagi sangat jarang komunitas untuk pemberdayaan pemuda bermitra kerja dengan SMP IT Al-Khairat. Guru menerangkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sekolah tanpa pelibatan etika digital berpotensi memperluas risiko kekerasan relasional. Pandangan dari peserta didik dan guru diperkokoh kepala sekolah (18/09/2025), karakteristik SMP IT Al-Khairat sebagai sekolah berbasis teknologi menuntut adanya kebijakan serta pendekatan preventif yang adaptif terhadap dinamika perilaku peserta didik dalam peradaban digital. Kepala sekolah mencermati program edukasi anti kekerasan tidak hanya berperan sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai bagian untuk pembentukan budaya sekolah dan pengawasan yang lebih berkeadaban. Secara keseluruhan, kesepadanan perspektif antara peserta didik, guru, dan kepala sekolah menegaskan bahwa penguatan literasi etika digital, kesadaran, serta pengelolaan emosi menjadi elemen kunci mencegah kekerasan di lingkungan sekolah berbasis teknologi.

### Evaluasi Program Edukasi

**Tabel 4.** Integrasi Kode Temuan

Kode Temuan	Mapping CIPP	Mapping UFE
Kebutuhan dan legitimasi edukasi	Konteks	Dasar Keberlanjutan Program
Kerentanan Psikososial	Konteks	Justifikasi Intervensi Preventif
Kesiapan Sumber Daya	Input	Standar Kualitas Pelaksanaan
Desain Berbasis Kebutuhan	Input	Replikasi Materi Program
Penguatan Sistem	Input	Edukasi Rekomendasi Operasional
Dinamika Implementasi	Proses	Program Strategi Pembelajaran
Respon dan Iklim Sosial	Proses	Partisipatif Penguatan Manajemen Program
Transformasi Kognitif	Produk	Penguatan Edukasi Karakter
Internalisasi Nilai	Produk	Reorientasi Norma di Sekolah
Komitmen Institusional	Produk	Institusionalisasi Anti Kekerasan

Tabel di atas merepresentasikan hasil proses axial coding kualitatif yang diperoleh dari sejumlah kode tematik. Kode-kode tersebut berikutnya dikategorisasikan secara sistematis dengan mengintegrasikan ke dalam dua kerangka evaluasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan dua model evaluasi yakni *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP) maupun *Utilization-Focused Evaluation* (UFE). Kombinasi CIPP maupun UFE dalam program edukasi anti kekerasan memungkinkan peneliti untuk dapat mengamati efektivitas, kualitas program secara sistematis, hingga memastikan hasil evaluasi berkontribusi langsung terhadap penguatan praktik pendidikan yang aman dan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process & Product*) dalam riset (Tsani et al., 2022, pp. 7-45), bertujuan untuk bisa mengidentifikasi program secara komprehensif yang dimulai dari keselarasan konteks pada kebutuhan, bagaimana kesiapan sumber daya, pelaksanaan program, hingga capaian hasil yang diperoleh. Ditinjau aspek evaluasi konteks, program edukasi anti kekerasan diterapkan berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungan sekolah. Empat sekolah sasaran membuktikan tingkat diversitas tinggi baik dari keberagaman peserta didik, intensitas interaksi sosial yang tinggi, maupun dinamika perkembangan psikososial peserta didik yang rentan terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Disamping itu,

penggunaan teknologi atau media komunikasi digital dalam pembelajaran turut memperluas ruang interaksi yang berpotensi menimbulkan kekerasan juga. Oleh karena itu, program edukasi anti kekerasan dipandang relevan serta kontekstual sebagai respon pada kebutuhan pencegahan kekerasan maupun penguatan iklim sekolah.

Evaluasi input edukasi anti kekerasan di seluruh sekolah sasaran membuktikan program didukung oleh kolaborasi sumber daya yang memadai baik kompetensi fasilitator, penyusunan materi berdasarkan analisis kebutuhan, dan penerimaan positif warga sekolah. Program edukasi yang dikonseptkan dengan sistematis dan menitikberatkan pemahaman bentuk-bentuk tindakan kekerasan, mekanisme dalam pelaporan, mengantisipasi sebagai pelaku, maupun nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, saling menghormati, bahkan empati. Keterlibatan guru dan dukungan kepala sekolah juga memperkuat legitimasi program untuk mempermudah integrasi nilai edukasi anti kekerasan ke dalam kurikulum pembelajaran serta budaya sekolah. Memasuki cakupan hal proses, program edukasi anti kekerasan terlaksana sesuai dengan perencanaan dan analisis kebutuhan diiringi respon positif dari peserta didik. Pendekatan edukasi interaktif, partisipatif, studi kasus, dan refleksi pengalaman mendukung keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami bentuk kekerasan. Proses edukasi juga memperlihatkan adanya ruang dialog yang aman terhadap peserta didik untuk mengungkapkan pengalaman serta pandangannya. Kendati demikian, pada evaluasi proses juga teridentifikasi oleh peneliti bahwa perlunya keberlanjutan program agar nilai-nilai yang disampaikan tidak bersifat sementara, tetapi terinternalisasi secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan minimnya literasi sosial-emosional peserta didik, modul ajar, maupun SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan kekerasan. Terakhir evaluasi produk, yang dimaknai sebagai luaran atau hasil capaian intervensi pada program edukasi anti kekerasan menghasilkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik mengenai isu dan bentuk kekerasan, dampaknya terhadap individu, hingga komitmen guru serta kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif maupun keterbukaan yang obyektif dalam menangani masalah. Secara keseluruhan ditinjau dari triangulasi data, program edukasi anti kekerasan memberikan dampak positif sebagai fondasi awal pembentukan budaya sekolah yang berkeadaban.

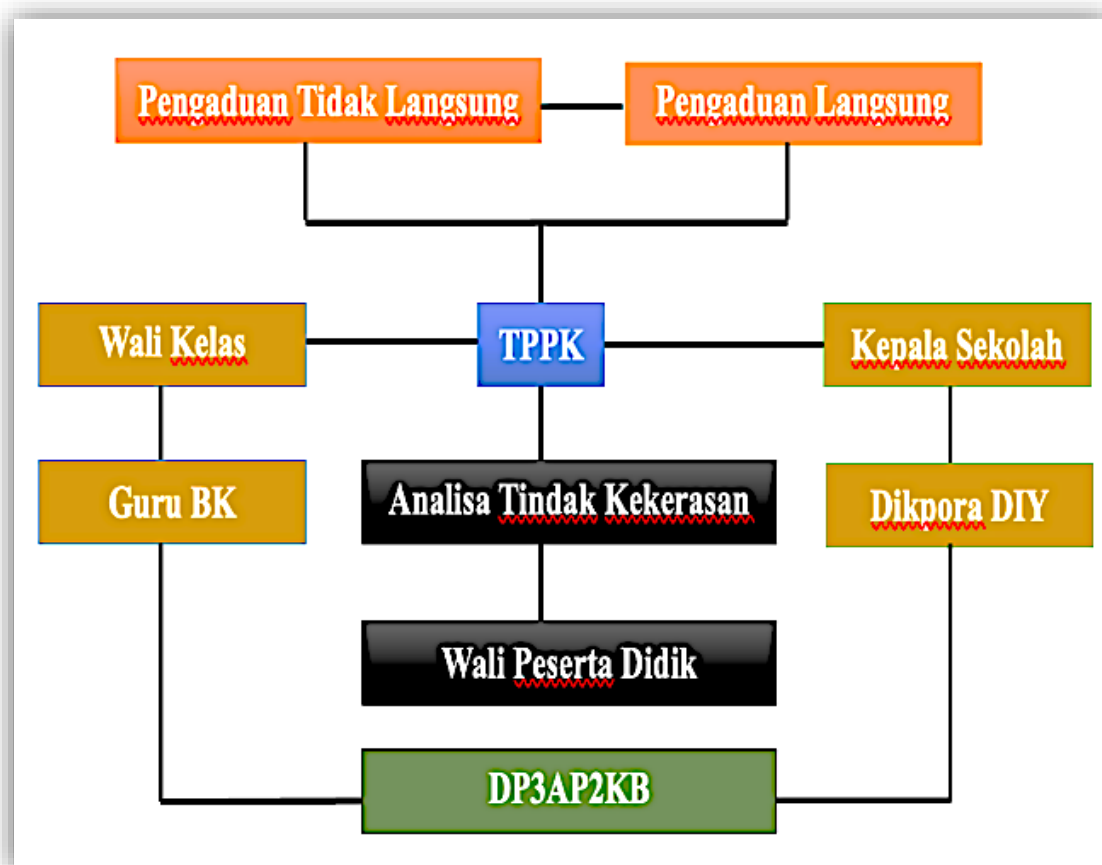
*Utilization Focused Evaluation* (UFE) merupakan model evaluasi yang menempatkan pemanfaatan hasil program terhadap subyek penelitian, menunjang pengambilan keputusan serta perbaikan program secara faktual. Dilihat pada konteks pendidikan, *Utilization Focused Evaluation* (UFE) menekankan relevansi temuan evaluasi pada kebutuhan peserta didik, guru, serta kepala sekolah supaya hasil evaluasi dapat diintegrasikan dalam kebijakan sekolah. Evaluasi *Utilization Focused Evaluation* (UFE) dalam program edukasi anti kekerasan berfungsi untuk menelusuri sejauh mana dapat untuk dipahami, diterima, hingga dimanfaatkan oleh peserta didik, refleksi guru, dan kepala sekolah, (Safaria, A.F, 2025, pp. 219-228). Hasil evaluasi model *Utilization Focused Evaluation* (UFE) berdasarkan tinjauan bersama menunjukkan program edukasi anti kekerasan dinilai aplikatif maupun bermanfaat. Program edukasi anti kekerasan yang diupayakan menunjang bentuk perlindungan diri dan lingkungan sosial peserta didik. Temuan perspektif guru, menyakinkan program edukasi anti kekerasan menjadi solusi yang digunakan untuk memudahkan integrasi nilai anti kekerasan pada proses pembelajaran sepanjang hayat. Artinya, hasil evaluasi tidak sebatas berhenti dalam tataran kognitif, tetapi juga berdampak terhadap pembentukan sikap serta perilaku sosial peserta didik. Lebih detail, pihak sekolah berdasarkan hasil evaluasi *Utilization Focused Evaluation* (UFE) juga memandang program edukasi anti kekerasan memberikan dasar yang kuat guna pengambilan keputusan mengenai penguatan kebijakan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, cerminan untuk refleksi sebagai langkah memperbaiki sistem pendampingan peserta didik, dan memperkuat budaya sekolah yang berkarakter. Dapat dikatakan, evaluasi berbasis *Utilization Focused Evaluation* (UFE) dalam program anti kekerasan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen penilaian, melainkan juga sebagai instrumen pembelajaran institusi yang mendukung keberlanjutan mitigasi kekerasan pada satuan pendidikan.

### **Rekomendasi Program**

Setelah mengetahui hasil dari evaluasi *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP) serta *Utilization Focused Evaluation* (UFE) program edukasi anti kekerasan, tentunya peneliti memiliki rekomendasi yang berfungsi sebagai jembatan antara temuan ilmiah dengan praktik pengambilan

keputusan. Maka, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat normatif semata, tetapi responsif terhadap permasalahan faktual di lapangan. Rekomendasi pencegahan kekerasan dalam sekolah bersifat *science based policy* yang memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan selaras kebutuhan peserta didik, karakteristik perkembangan remaja, bahkan dinamika sosial di sekolah. Selain itu, rekomendasi yang dicetuskan peneliti sebagai instrumen legitimasi kebijakan yang membangun komitmen bersama baik peserta didik dengan warga sekolah lainnya dalam pencegahan kekerasan. Fungsi lain rekomendasi untuk menjamin adaptabilitas program yang senantiasa diperbarui melalui siklus monitoring maupun evaluasi. Hal ini menjadikan kebijakan tidak bersifat statis, melainkan dinamis bahkan relevan dalam jangka panjang.

1. Mengintegrasikan edukasi anti kekerasan ke dalam kurikulum di sekolah, absolut dalam seluruh mata pelajaran. Rekomendasi ini menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan program. Materi anti kekerasan yang disampaikan peneliti diinternalisasikan melalui ekstrakurikuler, proyek profil pelajar Pancasila, serta juga mata pelajaran yang menekankan nilai empati, kesetaraan, hingga resolusi akan nonkekerasan. Integrasi materi edukasi memungkinkan nilai anti kekerasan tertanam secara konsisten untuk peserta didik secara langsung dan tidak langsung untuk kepala sekolah maupun guru sebagai warga sekolah.
2. Penguatan potensi pendidik maupun tenaga kependidikan perlu dibekali pelatihan terkait pendampingan psikososial bagi peserta didik, literasi etika, hingga deteksi dini kekerasan. Sebab, pelaku kekerasan tidak hanya sesama peserta didik, sehingga penguatan kapasitas bertujuan agar pendidik maupun juga tenaga kependidikan sebagai pembimbing serta pelindung dalam lingkungan belajar yang aman.
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) anti kekerasan di sekolah. SOP tersebut disarankan memuat deskripsi operasional, mekanisme pelaporan, tata cara penanganan, hingga skema pendampingan korban maupun pelaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diselaraskan dengan karakteristik setiap sekolah. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terperinci meminimalisir ambiguitas penanganan kekerasan, maupun meningkatkan kepercayaan peserta didik terhadap sistem sekolah.
4. Pembentukan tim pencegahan kekerasan di sekolah. Perlunya menetapkan tim khusus lintas peran yang terdiri komite sekolah, kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan orang tua, hingga perwakilan peserta didik yang diikutsertakan sebagai *peer educator* yang menaburkan nilai kesetaraan, inklusi, serta anti stigma.
5. Pengembangan sistem pelaporan yang ramah. Mekanisme pelaporan dirancang dengan keberpihakan pada korban maupun menjamin keamanan dan kerahasiaan. Dengan begitu, peserta didik merasa nyaman serta tenang untuk menyampaikan pengalaman kekerasan tanpa rasa takut akan stigma. Rekomendasi ini sejalan dengan upaya kesadaran pelaporan yang menjadi salah satu capaian program. Pelaporan tidak diarahkan sebagai tindakan menghukum, justru menjadi perlindungan serta pemulihan. Model pelaporan dapat dilakukan di ruang privat bersama guru BK, wali kelas, atau tim pencegahan kekerasan di sekolah. Selain itu, dapat melalui pelaporan digital yang tidak mewajibkan identitas pelapor, pengelolaan data yang aman, serta akses terbatas. Oleh karena itu, peneliti menyusun *flowchart* untuk memperjelas alur penanganan kekerasan. Diawali sikap penerimaan laporan, proses verifikasi awal, penanganan serta pendampingan korban, tindak lanjut edukatif terhadap pelaku, maupun monitoring pasca penanganan. Ketika tindak kekerasan terjadi, korban atau sanksi dapat melaporkan ke tim pencegahan dan penanganan baik secara langsung dan tidak langsung (kotak saran). Setelah menerima laporan, maka tim pencegahan dan penanganan berembuk untuk menentukan cara penanganan yang tepat dengan wali kelas dan guru BK. Kemudian, melakukan laporan awal ke kepala sekolah. Seusai analisa kasus, tim pencegahan dan penanganan melakukan investigasi ke pelaku. Hasil investigasi menentukan apakah kasus tersebut wajib melibatkan orang tua atau dapat diselesaikan di sekolah. Apabila kasus telah dituntaskan, tim pencegahan dan penanganan kembali memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait penyelesaian kasus tindak kekerasan, apakah perlu rekomendasi Dinas Pendidikan DIY dan DP3AP2KB sehingga memperoleh keputusan final.



**Gambar 3.** Alur Pelaporan & Penanganan

6. Penguatan kolaborasi multi *stakeholder* yakni sekolah, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai *stakeholder* menganugerahkan nilai tambah sebagai agen reflektif dan edukatif selain peneliti. Kolaborasi dikembangkan sebagai pendekatan kemitraan berkesinambungan dalam mendukung program edukasi anti kekerasan di satuan pendidikan.
7. Penguatan jejaring dukungan psikososial. Peneliti merekomendasikan sekolah untuk menjalin kerja sama bersama DP3AP2KB, psikolog, puskesmas, dinas pendidikan, atau lembaga layanan remaja. Hal tersebut untuk memantapkan penanganan kasus kekerasan yang membutuhkan intervensi berkelanjutan. Kebijakan kolaboratif urgensi bagi sekolah dengan keterbatasan layanan konseling.
8. Monitoring berkala, pemanfaatan evaluasi *Context, Input, Process*, dan *Product* (CIPP) serta *Utilization Focused Evaluation* (UFE) dilaksanakan secara berkelanjutan baik setiap semester maupun tahunan. Hasil evaluasi benar-benar dimanfaatkan sebagai perbaikan program. Umpan balik dari peserta didik, guru, orang tua wajib dijadikan dasar revisi kebijakan.

## SIMPULAN

Program edukasi anti kekerasan dapat dipahami sebagai investasi pendidikan serta sosial jangka panjang, upaya peningkatan sumber daya manusia yang bermartabat, berkarakter, maupun berkeadilan. Program edukasi anti kekerasan oleh peneliti menekankan bahwa suatu pencapaian berkualitas tidak dapat dilepaskan dari komitmen kolektif baik peneliti sebagai bagian dari masyarakat, guru, bahkan kepala sekolah untuk mencegah kekerasan maupun menjadi perlindungan hak-hak terhadap peserta didik. Secara lebih luas, implementasi program edukasi anti kekerasan berkontribusi secara langsung dalam pencapaian cita-cita *Sustainable Development Goal's* (SDG's), tujuan keempat yakni menjamin pendidikan adil, inklusif, dan bermutu dalam mengaplikasikan *learning to know* (mengetahui), *learning to do* atau (praktik), *learning to be* (komitmen), serta *learning to live together* (pembelajaran diri sepanjang hayat). Pendidikan bermakna tidak berpacu pada capaian akademik, tetapi juga mengedepankan proses pembentukan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi, stigma buruk, serta kekerasan. Menempatkan peserta didik sebagai subyek yang diberdayakan, dilindungi, maupun didukung keberaniannya melawan kekerasan. Tentunya program edukasi anti kekerasan terhadap peserta didik menunjang terwujudnya pendidikan yang aman. Tidak sebatas itu saja, program edukasi anti kekerasan tentunya dapat berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goal's* (SDG's) poin kelima yaitu kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan program dirancang sebagai strategis pencegahan kekerasan untuk seluruh gender, penghapusan kebiasaan negatif yang dinormalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M.A., Dasani, D.B.E.S., Harianto., Murti, E., & Baru, B.M. (2025). Sosialisasi Pencegahan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar. *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 9(1), pp. 8-12. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.4949>.
- Anisa, C.A. (2020). Konsep Kepemimpinan Otoriter Dalam Lembaga Pendidikan di Sekolah atau Madrasah. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), pp. 155-173. <https://doi.org/10.32478/leadership.v1i2.443>.
- Antara News. (2023.) Kemendikbudristek Tangani 127 Kasus Kekerasan di Sekolah Sejak 2021. <https://www.antarane.ws.com/>. Diakses pada 30 Januari 2026.
- Asrulla., Risnita., Jailani, M.S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), pp. 26320-26332.
- Detik Edu. (2024). FSGI: Ada 101 Korban Kekerasan Seksual di Sekolah Pada 2024. <https://www.detik.com/edu>. Diakses pada 30 Januari 2026.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. (2024). 187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY. <https://dp3ap2.jogjapro.go.id>. Diakses 30 Januari 2026.
- Juniar, N.E., Dianasari, I.N., Latifah, A.M., Silla, P.J., & Ngongo, G.C. (2024). Layanan Kesehatan Remaja di Daerah Terpencil: Strategi Holistik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Edukasi Seksual Bengawan *Nursing Journal*, 2(1), pp. 7-16. <https://jurnal.ppnisurakarta.org/index.php/bnj/article/view/22>.
- Kompas. (2024). JPPI: Terdapat 573 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang Tahun 2024. <https://www.kompas.com/>. Diakses pada 30 Januari 2026.
- Nurfatimah, D.A., Karsih., & Tjalla, A. (2024). Gambaran Kepercayaan Diri Remaja yang Mengalami Tindak Kekerasan (Studi Kasus Pada Remaja di Salah Satu SMK di Jakarta Timur). *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 18(1), pp. 93-101. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/insight/article/view/43709/19297>.
- Purnomo, A.H., Nasution, D.A., Annisa, R.M., Syaroh, M., & Sari, D.M. (2022). Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), pp. 2235-2241. <https://doi.org/1031004/jpdk.v4i3.5056>.

- Ramadhani, A., & Purnama, I. E. (2024). Maraknya Kekerasan Pada Lingkungan Sekolah. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), pp. 37-44. <https://doi.org/10.6238/wissen.v2i3.166>.
- Safaria, A.F. (2025). Pendekatan Kualitas Pada Evaluasi Efektivitas Program. *Jurnal of Regional Public Administration*, 10(2), pp. 219-228. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa>.
- Theresia, N.K.S., & Sanjaya, A. (2024). Analisis Faktor Risiko Terjadinya Gangguan Perilaku Pada Remaja Dengan Literature Review. *Calvaria Medical Jurnal*, 19(7), 1-15. <https://erepository.uwks.ac.id/18498/>.
- Tsani, I., Arsyadana, A., Surfirmsyah., & Shafira, E. (2021). *Al- Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), pp.17-45. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.86165>.
- Tuhuteru, L., Solehudin, M., Muhammadiyah, M., Kraugusteeliana., & Rais, R. (2023). Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital dan Informasi Di Indonesia Pada Era Disruptif, 5(2), pp. 1893-1900. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13367>.
- Zakaria, A., Kusmiyati., & Majid, N.C. (2023). Implementasi Gerakan Edukatif Mahasiswa Dengan Sosialisasi Bijak dan Kreatif Dalam Bersosial Media di Desa Rawaapu Tahun 2023. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 1(6), pp. 27-31. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v1i5.229>.